



Analisis Wacana Kritis *Norman Fairclough* terhadap Komunikasi Politik Presiden dalam Program YouTube Episode "Prabowo Menjawab"

Edwin Prayoga^{1*}, Nunik Hariyani², Fikri Hasan³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Madiun, Indonesia

*Penulis Korespondensi: edwinprayoga20@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the discourse construction, ideology, and power relations embedded in President Prabowo Subianto's communication in the YouTube interview program *Presiden Prabowo Menjawab* using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA). Employing a qualitative approach, the research applies Fairclough's three-dimensional framework comprising text, discursive practice, and social practice. The primary data consist of the full-version interview uploaded on Najwa Shihab's official YouTube channel on 7 April 2025, featuring seven senior editors from major Indonesian media. Data were collected through documentation, verbatim transcription, systematic nonverbal observation, and literature review, then analyzed through description, interpretation, and explanation. The findings reveal that, at the textual level, President Prabowo constructs a positive self-representation through action-oriented verbs, precise numerical data, strategic pronoun shifts, and rhetorical devices. At the discursive practice level, the interview adopts an unconventional multi-journalist format and is widely disseminated through YouTube, positioning participating media as co-producers of presidential discourse. At the social practice level, four ideological patterns—developmentalist executive ideology, civil–military continuity, personalization of power, and staged openness—work together to strengthen presidential legitimacy through charismatic, traditional-historical, and legal-rational authority while reinforcing media hegemony. The study contributes the concept of staged openness to political communication studies and highlights the importance of distinguishing symbolic openness from substantive accountability in presidential communication.*

Keywords: *Critical Discourse Analysis; Media Hegemony; Political Communication; Prabowo Subianto; Presidential Legitimacy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi wacana, ideologi, dan relasi kuasa yang dibangun Presiden Prabowo Subianto dalam program wawancara YouTube *Presiden Prabowo Menjawab* menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis tiga dimensi Fairclough yang meliputi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Sumber data utama berupa wawancara versi lengkap yang diunggah pada kanal YouTube resmi Najwa Shihab tanggal 7 April 2025 dan melibatkan tujuh pemimpin redaksi media nasional. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, transkripsi verbatim, observasi sistematis terhadap aspek nonverbal, dan studi pustaka, kemudian dianalisis melalui tahapan deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi teks, Presiden Prabowo membangun representasi diri positif melalui penggunaan verba tindakan, data numerik yang presisi, pergeseran pronomina, serta strategi retorik. Pada dimensi praktik diskursif, format wawancara multipemimpin redaksi dan distribusi melalui YouTube menempatkan media sebagai turut memproduksi wacana kepresidenan. Pada dimensi praktik sosial, empat pola ideologis, yaitu ideologi eksekutif developmental, kesinambungan sipil-militer, personalisasi kekuasaan, dan keterbukaan yang dipentaskan (*staged openness*), secara bersama memperkuat legitimasi kepresidenan melalui perpaduan otoritas karismatik, tradisional-historis, dan legal-rasional serta memperkuat hegemoni media. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan konsep *staged openness* dalam kajian komunikasi politik serta menegaskan pentingnya membedakan keterbukaan simbolik dan akuntabilitas substantif dalam komunikasi kepresidenan.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis; Hegemoni Media; Komunikasi Politik; Legitimasi Kepresidenan; Prabowo Subianto.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia pascareformasi 1998 telah memasuki babak baru dalam demokratisasinya, dengan komunikasi politik yang semakin kompleks antara negara, media, dan masyarakat. Pergeseran ini dipercepat oleh revolusi digital yang menempatkan platform video daring sebagai arena utama sirkulasi wacana politik. Berdasarkan laporan We are Sosial Indonesia

(Yonatan, 2025), Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna YouTube terbanyak keempat di dunia, dengan 143 juta pengguna aktif atau setara 50,2 persen populasi nasional, sementara data (Kemp, 2025) menunjukkan YouTube menjadi platform video yang paling sering ditonton oleh 65,05 persen pengguna internet Indonesia. Fakta ini menjadikan YouTube arena strategis bagi komunikasi politik yang menjangkau ratusan juta audiens secara langsung dan tanpa filter editorial.

Komunikasi politik bukan sekadar sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada publik, melainkan instrumen strategis dalam membangun citra, membentuk opini publik, serta memperkuat atau menantang struktur kekuasaan (Jeronimo, 2018). Nimmo menegaskan komunikasi politik sebagai kegiatan bersifat politis yang berkaitan dengan pembentukan makna di antara aktor politik, sementara McNair (Rohmah, 2025) menekankan bahwa komunikasi politik mencakup seluruh bentuk komunikasi yang dilakukan politisi untuk mencapai sasaran tertentu. Digitalisasi turut mendorong fenomena mediatisasi politik, yaitu ketika logika media digital semakin menentukan cara kekuasaan dikomunikasikan, direpresentasikan, dan dinegosiasikan di ruang publik.

Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum 2024 menandai babak baru dalam sejarah politik nasional. Pada peringatan 150 hari pemerintahannya, tepatnya Minggu, 6 April 2025, Prabowo menggelar wawancara nonstop selama lebih dari tiga jam bersama tujuh pemimpin redaksi dan jurnalis senior dari tujuh media nasional terkemuka Alfito Deannova Ginting (Detikcom), Lalu Mara Satriawangsa (tvOne), Uni Lubis (IDN Times), Najwa Shihab (Narasi), Sutta Dharmasaputra (Kompas), Retno Pinasti (SCTV-Indosiar), dengan Valerina Daniel (TVRI) sebagai moderator di ruang perpustakaan kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor. Wawancara ini disiarkan secara on the record dan didistribusikan serentak melalui berbagai kanal YouTube media nasional. Tayangan berjudul "Presiden Prabowo Menjawab" yang diunggah kanal YouTube Mata Najwa pada 7 April 2025 menembus lebih dari 3,8 juta penayangan, 54.000 suka, dan 15.705 komentar, menjadikannya salah satu peristiwa komunikasi politik paling viral pada awal pemerintahan Presiden Prabowo.

Wacana yang diproduksi dalam forum semacam ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai pertukaran informasi biasa. Bahasa, sebagaimana dikemukakan Fairclough (Marzuki, 2023), tidak pernah bersifat netral, bahasa selalu terhubung dengan relasi sosial, identitas, dan kekuasaan. Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) model Fairclough, dengan tiga dimensi analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial, hadir sebagai kerangka

metodologis yang tepat untuk membongkar lapisan makna tersembunyi di balik teks sekaligus menghubungkannya dengan konteks sosial yang lebih luas.

Tingginya respons publik terhadap wawancara ini tidak lepas dari konteks sosial-politik yang melingkupinya: gelombang demonstrasi mahasiswa yang menolak Revisi UU TNI, kekhawatiran publik atas kebebasan pers pascateror kepala babi ke redaksi Tempo, serta polemik kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyoroti bahwa format wawancara dengan media terbatas berpotensi membatasi arus informasi publik (Yunus, 2025), sementara pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Suko Widodo menilai wawancara ini penting namun perlu diperluas keterlibatan publiknya (Yunus, 2025). Meski kajian komunikasi politik di Indonesia berkembang pesat, penelitian yang secara spesifik menganalisis wacana komunikasi politik presidensial melalui pendekatan CDA Fairclough pada konteks wawancara multi-jurnalis berdurasi panjang yang didistribusikan secara digital masih sangat terbatas. (Hariyani & Nurchayati, 2015) sebelumnya mengenai reifikasi iklan kampanye Pemilu 2014 di televisi lokal turut menjadi pijakan penting bagi penelitian ini, dengan menunjukkan bahwa iklan politik cenderung mereduksi figur kandidat menjadi komoditas citra yang terlepas dari rekam jejak substantifnya, sebuah pola konstruksi realitas politik melalui media yang secara konseptual sejalan dengan gagasan hegemoni media yang dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian ini. Perbedaannya, penelitian memfokuskan diri pada iklan politik berdurasi singkat di televisi lokal, sedangkan penelitian ini mengkaji wawancara presidensial multi-jurnalis berdurasi panjang yang didistribusikan secara digital. Celah akademis inilah yang melandasi penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi wacana yang dibangun Presiden Prabowo pada dimensi teks (pilihan kosakata, struktur kalimat, strategi retorik, tuturan verbal dan nonverbal); mengidentifikasi praktik diskursif terkait produksi, distribusi, dan konsumsi wacana tersebut oleh berbagai kanal media nasional; serta menjelaskan dimensi praktik sosial, khususnya bagaimana wawancara berfungsi sebagai arena negosiasi legitimasi kepemimpinan, reproduksi ideologi kekuasaan, respons terhadap kritik publik, dan pembentukan hegemoni wacana dalam demokrasi Indonesia pascapemilu 2024.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) model Norman Fairclough, yang mengkaji secara simultan dimensi linguistik teks, praktik sosial yang melingkupi produksi dan konsumsi teks,

serta relasi antara wacana dengan struktur kekuasaan dan ideologi (Hasan Ma'ruf, 2026). Objek penelitian adalah wacana komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara "Presiden Prabowo Menjawab". Data primer berupa tuturan verbal dan nonverbal presiden yang ditranskripsi secara verbatim dari tayangan video wawancara versi utuh (full version) berdurasi sekitar 3 jam 30 menit yang diunggah kanal YouTube resmi Najwa Shihab pada 7 April 2025 (<https://www.youtube.com/watch?v=-WLpXmnBmxo>), sementara data sekunder diperoleh dari pemberitaan media massa, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi: dokumentasi (pengunduhan dan transkripsi verbatim tayangan), observasi nonverbal sistematis (gestur, ekspresi wajah, kontak mata, intonasi, dan jeda bicara pada sembilan segmen tematik), serta studi literatur atas teori CDA, komunikasi politik, dan legitimasi kekuasaan. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data bertujuan memperoleh data yang komprehensif dan meningkatkan kedalaman analisis dalam penelitian kualitatif (Zahroh et al., 2025). Studi literatur mengenai CDA digunakan sebagai landasan konseptual dalam mengidentifikasi hubungan antara teks, praktik diskursif, dan praktik sosial sebagaimana dikemukakan oleh Fairclough (Agus, 2025). Analisis data mengikuti tiga tahap Fairclough: deskripsi (analisis teks pada level kosakata, tata bahasa/transitivitas dan modalitas, kohesi, dan struktur teks), interpretasi (praktik diskursif mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi wacana), dan eksplanasi (praktik sosial yang menghubungkan temuan diskursif dengan konteks demokrasi Indonesia pascapemilu 2024). Keabsahan data dijaga melalui ketekunan pengamatan, triangulasi sumber dan modalitas data (verbal-nonverbal), (Susanto et al., 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara "Presiden Prabowo Menjawab" berlangsung lebih dari tiga jam dan mencakup sepuluh segmen tematik yang dianalisis secara komprehensif pada tiga dimensi CDA Fairclough: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Tabel 1 memetakan segmen tematik wawancara beserta jurnalis pengaju dan topik utamanya.

Tabel 1. Peta Segmen Tematik Wawancara "Presiden Prabowo Menjawab"

Tema Wacana	Jurnalis Pengaju	Topik Utama
Pencapaian 150 Hari	Valerina Daniel (TVRI)	Swasembada, MBG, Danantara, inflasi
Komunikasi & Persona	Alfito Ginting (Detikcom)	Kegagalan komunikasi, buzzer, visi fundamental vs monumen
Demonstrasi & RUU TNI	Uni Lubis (IDN Times)	Demo mahasiswa, sikap aparat, urgensi RUU TNI

Tema Wacana	Jurnalis Pengaju	Topik Utama
Pasar Modal & Tarif Trump	Lalu Mara (tvOne)	Dampak tarif Trump, pasar saham, ekspor garmen
Legislasi & Kewenangan Polisi	Najwa Shihab (Narasi)	RUU Polri, transparansi legislasi, partisipasi publik
Birokrasi & Rule of Law	Sutta Dharma (Kompas)	Nilai diri 6/10, birokrasi bloated, penegakan hukum
Visi Ekonomi & Program	Alfito Ginting (follow-up)	Target 8%, Sekolah Rakyat, 80 ribu koperasi
Korupsi & Lapangan Kerja	Retno Pinasti (SCTV)	Hukuman koruptor, pulau terpencil, penciptaan lapangan kerja
Danantara & Peran Swasta	Lalu Mara (follow-up)	Danantara, proteksionisme Trump, peran swasta
Silaturahmi Kebangsaan & Timnas	Valerina Daniel (penutup)	Peran Didit, lawan politik bukan musuh, Timnas Piala Dunia

Sumber: Diolah oleh peneliti dari transkrip wawancara “Presiden Prabowo Menjawab”, kanal YouTube Najwa Shihab, 7 April 2025.

Format Wawancara sebagai Arena Kekuasaan Diskursif

Sebelum masuk ke analisis tematis, format wawancara itu sendiri perlu dikaji sebagai arena kekuasaan diskursif. Menurut Fairclough (Ilma et al., 2025), wacana tidak hanya dipahami melalui teks, tetapi juga melalui praktik diskursif dan praktik sosial yang membentuk proses produksi serta konsumsi makna.. Wawancara ini melibatkan tujuh jurnalis secara serentak dalam satu sesi berdurasi lebih dari tiga jam, disiarkan melalui berbagai kanal YouTube media nasional, dilaksanakan di ruang perpustakaan pribadi presiden di Hambalang, dan tidak menyertakan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Format ini secara diskursif menciptakan dinamika yang menguntungkan narasumber: pergantian jurnalis dengan topik berbeda memungkinkan presiden me-reset mood diskursif setelah segmen yang menekan, sementara lokasi perpustakaan pribadi berfungsi sebagai framing fisik yang membangun ethos kebijaksanaan dan otoritas presiden sebelum satu kata pun diucapkan. Bahwa wawancara berlangsung hari Minggu tanpa daftar pertanyaan pun diframing sebagai gestur keterbukaan luar biasa, sehingga format wawancara ini sendiri merupakan strategi hegemoni: presiden tampil “terbuka” secara simbolis, sehingga ketika pertanyaan kritis tidak dijawab secara substantif, hal itu tampak sebagai kekurangan forum, bukan kegagalan akuntabilitas.

Dimensi Teks: Strategi Numerifikasi dan Naturalisasi

Tabel 2 memetakan sepuluh kutipan representatif dari transkrip wawancara yang mencakup seluruh segmen tematik, disertai konteks kemunculan, sumber (penanda waktu), serta tujuan diskursif yang menyertainya, sehingga temuan pada dimensi teks ini dapat ditelusuri kembali ke data primer penelitian.

Tabel 2. Dimensi Teks: Pemetaan Kutipan Kunci Wawancara “Presiden Prabowo Menjawab”

Segmen Tematik	Teks (Kutipan)	Sumber	Tujuan Diskursif
Pencapaian 150 Hari	<i>“...kuncinya adalah bagaimana eksekusi, bagaimana mewujudkan, bagaimana deliver...”</i>	00:01:16	Membangun ethos kepemimpinan yang matang dan siap sejak awal masa jabatan
Komunikasi & Persona	<i>“...monumen yang terhebat...adalah kalau dia bisa meninggalkan sistem fundamental yang menjamin pangan, energi, air...”</i>	00:29:14–00:29:55	Reframing kritik minimnya capaian fisik menjadi narasi keberhasilan struktural
Demonstrasi & RUU TNI	<i>“...sikap aparat masih abusif, termasuk demo RUU TNI...” (pertanyaan jurnalis)</i>	00:49:14–00:49:38	Teks pemicu (trigger text) yang mendorong strategi defleksi presiden
Pasar Modal & Tarif Trump	<i>“...tarif Trump ini menggoncangkan...kita tidak panik...we have so much strength...”</i>	03:00:21–03:00:42	Technologization of discourse melalui campur kode bahasa Inggris untuk kesan percaya diri global
Legislasi & Kewenangan Polisi	<i>“...semua undang-undang itu dibahas oleh semua partai politik yang dipilih rakyat. Kan begitu kan?”</i>	01:29:30–01:29:36	Pertanyaan retorik sebagai instrumen naturalisasi ideologi
Birokrasi & Rule of Law	<i>“...saya kasih nilai diri saya enam...tapi passing grade nilainya C itu tidak...”</i>	01:46:51–01:47:18	Strategi kerendahan hati strategis (strategic modesty)
Visi Ekonomi & Program	<i>“...aku cadangkan 8% pertumbuhan...aku on record loh...”</i>	02:01:27–02:01:58	Pergeseran register pronomina untuk ekspresi ambisi personal yang otentik
Korupsi & Lapangan Kerja	<i>“...menempatkan para koruptor ini di pulau terpencil yang dikelilingi hiu...”</i>	02:09:03–02:09:08	Retorika ketegasan hukum melalui citra dramatis
Danantara & Swasta	<i>“...infrastruktur kereta api, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta...lebih efisien...”</i>	03:13:44–03:14:06	Naturalisasi ideologi pasar bebas sebagai kebenaran logis
Silaturahmi Kebangsaan & Timnas	<i>“...anak saya, Didit, itu sudah lama jadi dia itu memang...”</i>	02:27:18	Personalisasi kekuasaan melalui narasi keluarga untuk citra rekonsiliasi

Sumber: Diolah oleh peneliti dari transkrip wawancara “Presiden Prabowo Menjawab”, kanal YouTube Najwa Shihab, 7 April 2025.

Pada level kosakata, tuturan presiden didominasi verba aksi seperti “eksekusi”, “mewujudkan”, dan “deliver” (campur kode bahasa Inggris) yang secara semantis bersinonim gejala overwording yang menandakan preokupasi ideologis terhadap citra kerja nyata. Pada level tata bahasa, pola transitivitas menempatkan “saya” sebagai agen tunggal pada klausa naratif keberhasilan (“saya memanfaatkan”, “saya kumpulkan”), memperkuat sentralitas peran individu presiden dalam narasi keberhasilan yang sesungguhnya bersifat kolektif; sebaliknya,

pronomina jamak “kita” pada klausa seperti “kita luncurkan Danantara” mengalihkan agensi dari individu ke kolektif kepemimpinan, mendistribusikan tanggung jawab sekaligus legitimasi ke institusi yang lebih luas. Modalitas kategoris (“kuncinya adalah...”) menghadirkan klaim strategi sebagai fakta tunggal yang tidak terbantahkan, sementara modalitas epistemik (“saya kira...”) melunakkan klaim otoritatif menjadi opini personal sebagai strategi hedging.

Kata “monumen” dipilih sebagai metafora sentral yang mereklasifikasi ulang makna keberhasilan pemerintahan dari capaian fisik menjadi capaian struktural yang tidak kasatmata, sementara pertanyaan retorik (“Kan begitu kan?”) berfungsi sebagai instrumen naturalisasi ideologi tanpa penjelasan substantif. Kohesi teks dibangun melalui repetisi paralel (“bagaimana...bagaimana...bagaimana”) dan pengulangan leksikal penanda waktu, menciptakan efek ritmis penegasan. Kutipan pertanyaan jurnalis (“...sikap aparat masih abusif...”) menunjukkan bahwa leksis bermuatan evaluatif tinggi dari jurnalis turut membentuk agenda linguistik yang harus direspons presiden, sementara delesi agensi pada konstruksi pasif implisit justru membuka ruang bagi presiden melakukan defleksi karena tidak ada rujukan spesifik yang wajib dijawab langsung.

Dimensi Praktik Diskursif

Dimensi praktik diskursif mengkaji wacana wawancara bukan sekadar sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang masing-masing dibentuk oleh kondisi sosial dan relasi kekuasaan tertentu (Lalu, 2025). Meskipun forum ini dilabeli sebagai “dialog terbuka tanpa sensor”, strukturnya secara fundamental bersifat asimetris: Prabowo berperan ganda sebagai narasumber tunggal sekaligus tuan rumah forum di kediaman pribadinya, memberinya kekuasaan struktural untuk mengatur agenda dan membingkai arah diskusi sejak awal.

Sejumlah jurnalis tetap mengajukan pertanyaan kritis yang menyentuh isu paling sensitive. Uni Lubis mempertanyakan urgensi RUU TNI, Najwa Shihab mempertanyakan potensi perluasan wewenang RUU Kepolisian namun pertanyaan tajam tersebut secara konsisten berhasil dinetralisasi atau dibingkai ulang oleh presiden, baik melalui delesi agensi, jawaban normatif prosedural, maupun jeda tempo bicara yang signifikan. Setelah diproduksi, wacana ini didistribusikan secara serentak melalui kanal YouTube kepresidenan dan ketujuh media nasional yang terlibat, menjangkau lebih dari 3,8 juta penayangan pada kanal Mata Najwa saja. Media, dalam konteks ini, bertransformasi dari fungsi pengawas (watchdog) menjadi co-producer sekaligus amplifier bagi wacana dominan presiden, sementara konsumsi teksnya bersifat terpolarisasi antara resepsi publik yang antusias dan pembacaan kritis dari kalangan pemantau media dan akademisi. Wacana ini juga sarat intertekstualitas merujuk

demonstrasi mahasiswa, polemik RUU TNI, teror kepala babi Tempo, dan tarif Trump sekaligus menampilkan interdiskursivitas tinggi melalui percampuran register kenegaraan-teknokratis, militeristik-otoritatif, populer-emosional, dan kekeluargaan-personal dalam satu forum yang sama.

Dimensi Praktik Sosial

Wawancara ini tidak berlangsung dalam kevakuman sosial, melainkan di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang menolak Revisi UU TNI dan kekhawatiran publik atas potensi kebangkitan dwifungsi militer. Dalam konteks ketimpangan antara aspirasi publik dan keputusan politik inilah format dialog Prabowo berfungsi sebagai perisai dialogis (dialogical shield): alih-alih mengeluarkan pernyataan sepihak, presiden memilih berdialog langsung dengan tujuh pemimpin redaksi, sebuah mekanisme peredam yang menaturalisasi kebijakan kontroversial seolah telah “dijawab” secara memadai. Wacana yang dibangun Prabowo juga merupakan bagian dari proyek reposisi diri dari figur militer menuju negarawan sipil-demokratis: pujian berulang terhadap jasa para pendahulu, pengakuan bahwa lawan politik “bukan musuh”, serta penekanan bahwa dirinya pernah patuh diberhentikan oleh Presiden sipil B.J. Habibie, semuanya bekerja menempatkan presiden dalam garis suksesi kepemimpinan nasional yang sah dan inklusif. Strategi ini menunjukkan upaya membangun legitimasi melalui pembentukan identitas dan representasi diri yang positif di hadapan publik (Nonci, 2025). Selain itu, proses tersebut mencerminkan praktik hegemoni, yaitu pembentukan persetujuan publik melalui konstruksi makna yang diterima sebagai sesuatu yang wajar, bukan melalui pemaksaan langsung (Azzahra et al., 2026).

Pada level praktik sosial, partisipasi ketujuh pemimpin redaksi dalam forum yang formatnya ditentukan sepenuhnya oleh Istana merefleksikan konsep hegemoni Antonio Gramsci: dominasi kekuasaan dipertahankan bukan melalui paksaan, melainkan melalui konsensus yang diproduksi secara halus lewat institusi media massa. Merujuk pada konsep ruang publik Jürgen Habermas, media massa seharusnya berfungsi sebagai wadah independen bagi perdebatan rasional dan setara; namun keterbukaan yang diklaim dalam forum ini pada praktiknya tetap dibatasi oleh format media yang terbatas dan struktur kekuasaan yang timpang. Secara keseluruhan, temuan pada ketiga dimensi saling menguatkan satu argumen utama: wawancara ini berfungsi sebagai arena negosiasi legitimasi kekuasaan yang dikemas dalam format keterbukaan, namun secara substantif tetap dikendalikan oleh presiden sebagai narasumber tunggal.

Konstruksi Ideologi Kekuasaan

Analisis lintas-dimensi menemukan empat pola ideologis yang bekerja secara simultan dan saling menopang.

Ideologi Kerja Nyata (Developmentalisme Eksekutif)

Dominasi verba aksi dan numerifikasi tanggal maupun angka (target pertumbuhan 8%, 80.000 koperasi, peluncuran Danantara pada 24 Februari) membangun ideologi bahwa legitimasi kepemimpinan bersumber dari kerja nyata dan capaian terukur, bukan dari proses deliberasi atau konsensus politik.

Ideologi Kesenambungan Sipil-Militer

Alusi terhadap Supersemar dan tongkat Nabi Musa berdampingan dengan penegasan berulang bahwa dirinya “tidak mau otoriter”, sebuah kontradiksi ideologis yang secara diskursif menaturalisasi kehadiran unsur kepemimpinan bergaya militer di ranah sipil tanpa memunculkan kesan otoriter secara eksplisit.

Ideologi Personalisasi dan Familialisme Kekuasaan

Narasi peran Didit sebagai jembatan komunikasi lintas presiden dan pergeseran register pronomina personal (“aku on record loh”) menunjukkan bahwa kekuasaan presidensial turut dipersonalisasi melalui narasi keluarga, membangun kedekatan emosional dan melunakkan kesan formal-birokratis kekuasaan negara.

Ideologi Keterbukaan Simbolik (Staged Openness)

Penyelenggaraan forum dengan tujuh jurnalis tanpa daftar pertanyaan baku membangun ideologi keterbukaan yang tampil meyakinkan secara simbolis, namun bertentangan dengan pola nonverbal seperti jeda jawaban yang memanjang dan kontak mata yang terputus pada segmen paling sensitif, sebuah bukti bahwa keterbukaan yang ditampilkan bersifat simbolis dan terkelola, bukan keterbukaan substantif.

Keempat pola ideologis ini bekerja secara simultan melalui berbagai saluran komunikasi, verbal maupun nonverbal, sejalan dengan konsep naturalisasi ideologi (Rumaf et al., 2025). pesan ideologis disampaikan berulang sehingga tampak sebagai kewajiban (common sense), alih-alih sebagai satu di antara berbagai kemungkinan interpretasi atas realitas politik yang diperdebatkan.

Legitimasi Multilapis dan Hegemoni Media

Konstruksi ideologi di atas menopang tiga jenis legitimasi kekuasaan sekaligus, sejalan dengan tipologi Weber (Maryati & Herlambang, 2025) membagi tindakan sosial ke dalam empat tipologi, yaitu tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), tindakan rasional berorientasi nilai (*wertrational*), tindakan afektif (*affectual action*), dan tindakan tradisional

(*traditional action*). Legitimasi karismatik dibangun melalui narasi kerja nyata dan keberanian personal (“aku on record loh”), menonjolkan keberanian bervisi sebagai sumber otoritas pribadi. Legitimasi tradisional-historis dibangun melalui reposisi presiden dalam garis suksesi kepemimpinan nasional pascareformasi, ditegaskan lewat pujian berulang terhadap jasa para pendahulu serta kepatuhannya diberhentikan oleh Presiden sipil B.J. Habibie. Legitimasi legal-rasional dibangun melalui penyajian data dan angka yang presisi nilai aset Danantara 982 miliar dolar, klaim penyelamatan anggaran 1.440 triliun rupiah dari lahan sawit, serta retorika prosedural bahwa “semua undang-undang itu dibahas oleh semua partai politik yang dipilih rakyat” meskipun angka-angka besar tersebut umumnya disampaikan tanpa penjelasan metodologis yang memadai.

Ketiga jenis legitimasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh peran media sebagai co-producer legitimasi: partisipasi tujuh pemimpin redaksi dalam forum yang formatnya ditentukan sepenuhnya oleh Istana menjadikan media bukan penantang independen, melainkan mitra dialog yang turut melegitimasi ketiga narasi tersebut di hadapan jutaan penonton konsisten dengan konsep hegemoni Antonio Gramsci (Jayanti, 2026) bahwa dominasi kekuasaan dipertahankan bukan melalui paksaan, melainkan melalui konsensus yang diproduksi secara halus lewat institusi sosial. Efektivitas diskursif dari strategi legitimasi multilapis ini terletak pada kemampuannya menjangkau basis penerimaan publik yang luas dan heterogen audiens yang menghargai kerja nyata, audiens yang menghargai kesinambungan dan stabilitas, serta audiens teknokratis yang menghargai data dan prosedur dalam satu peristiwa komunikatif yang sama.

Strategi Komunikasi Politik Presiden Prabowo dalam Menghadapi Kritik

Analisis kombinasi data teks dan data nonverbal pada berbagai segmen tematik menemukan bahwa presiden mengadaptasi kombinasi strategi verbal dan nonverbal sesuai jenis ancaman citra yang dihadapi.

Kritik Kompetensi Komunikasi

Ketika dikonfrontasi dengan tuduhan “gagal komunikasi” dan keberadaan buzzer, presiden menunjukkan strategi pengakuan terbatas: mengakui adanya masalah komunikasi secara umum, namun menolak label “buzzer” secara spesifik, sebuah strategi yang memisahkan pengakuan kesalahan minor dari tuduhan yang lebih serius terhadap integritas.

Kritik Keamanan dan Represi

Pertanyaan kritis mengenai demonstrasi dan represi aparat direspons dengan tempo bicara yang meningkat, gaya bicara tegas bernuansa militer, dan kontak mata kuat, menunjukkan strategi menegaskan otoritas dan keyakinan alih-alih sikap defensif.

Kritik Transparansi dan Akuntabilitas

Kritik soal transparansi RUU Polri direspons dengan pertanyaan retorik yang menaturalisasi legitimasi kebijakan secara verbal, namun disertai jeda menjawab yang memanjang dan kontak mata yang lebih banyak diarahkan kepada moderator segmen ini menunjukkan inkongruensi paling jelas antara klaim keterbukaan verbal dan sinyal keraguan nonverbal, menjadikannya bukti empiris paling kuat bagi strategi evasif terselubung.

Kritik Evaluasi Diri

Pertanyaan reflektif mengenai evaluasi diri direspons dengan pengakuan nilai “enam” disertai penegasan bahwa nilai “C” tidak dapat diterima, dikombinasikan dengan tempo bicara yang melambat dan kontak mata langsung tanpa dialihkan sebuah strategi kerendahan hati strategis yang justru memperkuat kredibilitas presiden.

Kritik Integritas Moral

Pertanyaan mengenai efek jera bagi koruptor direspons dengan tempo bicara yang kuat dan repetitif, kontak mata yang kuat, serta postur condong ke depan, dikuatkan oleh retorika dramatis “koruptor di pulau terpencil dikelilingi hiu” menunjukkan strategi positioning moral yang menempatkan presiden sebagai pemimpin yang berprinsip.

Kelima pola tersebut menunjukkan bahwa kritik yang menyentuh kompetensi dan evaluasi diri cenderung dihadapi dengan pengakuan terbatas atau kerendahan hati strategis, sedangkan kritik yang menyentuh otoritas, keamanan, dan integritas moral cenderung dihadapi dengan penegasan ketegasan. Satu-satunya segmen yang menunjukkan inkongruensi signifikan antara sinyal verbal dan nonverbal adalah kritik transparansi kebijakan RUU Polri, sebuah temuan yang memberikan bukti empiris paling kuat bagi argumen bahwa keterbukaan yang ditampilkan presiden dalam wawancara ini bersifat simbolis dan terkelola.

Implikasi Praktis Dan Teoritis

Implikasi Teoretis

Penelitian ini menunjukkan bahwa model tiga dimensi CDA Fairclough tetap relevan dan mampu diadaptasi untuk mengkaji peristiwa komunikasi politik berbasis platform digital yang menggabungkan data verbal dan nonverbal secara simultan. Penelitian ini juga memperkaya kerangka legitimasi Max Weber dengan menunjukkan bahwa ketiga tipe legitimasi (karismatik, tradisional-historis, dan legal-rasional) dapat dikonstruksi secara simultan dan saling menopang dalam satu peristiwa komunikatif, alih-alih berdiri sebagai kategori terpisah. Konsep “keterbukaan simbolis” (staged openness) yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian mediatisasi politik dan hegemoni wacana di Indonesia.

Implikasi Praktis

Bagi praktisi media dan jurnalis, temuan ini menegaskan pentingnya kewaspadaan kritis terhadap format wawancara yang sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang diwawancarai, agar posisi media tidak tereduksi menjadi mitra legitimasi kekuasaan. Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini menjadi bahan refleksi tentang pentingnya keterbukaan substantif, bukan sekadar keterbukaan simbolis, dalam komunikasi kebijakan publik. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mendorong literasi kritis dalam membaca wacana kekuasaan yang disampaikan melalui format komunikasi yang tampak terbuka dan dialogis. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian komparatif terhadap wawancara atau pidato presiden pada periode berbeda, membandingkannya dengan wacana kepala negara lain, dan melibatkan analisis resepsi khalayak terhadap komentar publik di YouTube guna memahami bagaimana wacana kekuasaan dimaknai secara beragam oleh publik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan empat hal utama. Pertama, pada dimensi teks, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten membangun representasi diri melalui dominasi verba aksi dan numerifikasi data presisi, pergeseran register pronomina dari “saya” formal-institusional menuju “kita” kolektif-kelembagaan dan “aku” personal-informal, serta strategi retorik seperti pertanyaan retorik, dialogical shield, dan pengakuan keterbatasan diri yang disampaikan secara strategis; data nonverbal pada umumnya kongruen dengan klaim verbal, kecuali pada segmen kritik transparansi RUU Polri yang menunjukkan inkongruensi paling menonjol.

Kedua, pada dimensi praktik diskursif, wawancara ini diproduksi melalui format nonkonvensional yang melibatkan tujuh pemimpin redaksi media nasional secara serentak tanpa daftar pertanyaan baku, kemudian didistribusikan secara masif melalui berbagai kanal YouTube sehingga menjangkau jutaan penonton dan memicu puluhan ribu komentar publik mencerminkan transformasi order of discourse komunikasi presidensial Indonesia dari pola formal dan satu arah menuju format yang tampak dialogis dan interaktif, namun tetap sepenuhnya dikendalikan oleh pihak Istana.

Ketiga, pada dimensi praktik sosial, penelitian ini menemukan bahwa presiden mengonstruksi ideologi kekuasaan melalui empat pola yang bekerja secara simultan ideologi kerja nyata, kesinambungan sipil-militer, personalisasi dan familialisme kekuasaan, serta keterbukaan simbolis yang menopang konstruksi legitimasi multilapis: karismatik, tradisional-historis, dan legal-rasional sebagaimana kerangka Max Weber, yang diperkuat oleh mekanisme

hegemoni Gramscian di mana media massa berfungsi sebagai mitra dialog yang turut melegitimasi narasi kekuasaan presiden, bukan sebagai penantang independen.

Keempat, dalam merespons kritik publik, presiden menerapkan enam strategi komunikasi politik yang saling melengkapi reframing dan defleksi substansi, kerendahan hati strategis, evasion verbal-nonverbal terselubung, pergeseran register personal, keselarasan emosional selektif, dan penutupan positif yang diterapkan secara adaptif sesuai lima jenis kritik yang dihadapi. Kritik transparansi kebijakan RUU Polri merupakan satu-satunya segmen yang menunjukkan inkongruensi signifikan antara klaim keterbukaan verbal dan sinyal keraguan nonverbal, menjadi bukti empiris paling kuat bahwa keterbukaan yang ditampilkan presiden dalam wawancara ini bersifat simbolis dan terkelola, bukan keterbukaan substantif.

Secara keseluruhan, wawancara “Presiden Prabowo Menjawab” berfungsi sebagai arena strategis di mana Presiden Prabowo Subianto secara simultan mengonstruksi wacana, ideologi, dan legitimasi kepemimpinan multilapis, merespons kritik publik secara adaptif, serta memanfaatkan simbiosis dengan media massa untuk membangun hegemoni wacana dalam konteks demokrasi Indonesia pascapemilu 2024. Keterbukaan format wawancara yang tampak dialogis pada dasarnya tetap beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang terkelola secara cermat oleh pihak Istana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing dan segenap civitas akademika Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Madiun atas bimbingan dan dukungan selama penelitian ini berlangsung.

DAFTAR REFERENSI

- Agus, S. (2025). *Analisis kritis wacana retorika politik di Indonesia: Studi berdasarkan pendekatan dialectical-relational Fairclough* [Skripsi, Universitas Jambi].
- Azzahra, F., Malik, A., Abdiyatussolehah, A., Maulidiya, W., & Oktasari, A. F. (2026). Praktik hegemoni dalam cerpen *Mata Celurit* karya Muna Masyari: Tinjauan teori Antonio Gramsci. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(3), 853–862. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.1319>
- Hariyani, N., & Nurchayati, Z. (2015). Analisis reifikasi iklan kampanye Pemilu 2014 di media sebagai konstruksi realitas politik. *Jurnal Sosial*, 16(1).
- Hasan Ma'ruf, A. (2026). *Analisis wacana kritis terhadap penafsiran ideologi radikal dalam ayat jihad* [Skripsi, Universitas PTIQ Jakarta].

- Ilma, C., Liliani, E., & Efendi, A. (2025). Strategi linguistik dan praktik sosial dalam iklan pinjaman online: Studi wacana kritis Norman Fairclough. *Bahasa: Jurnal Keilmuan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(3), 807–823. <https://doi.org/10.26499/bahasa.v7i3.1653>
- Jayanti, N. F. D. (2026). *Babel karya R. F. Kuang dalam pandangan hegemoni Gramsci. Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya*, 5(1), 14–28. <https://doi.org/10.55606/protasis.v5i1.263>
- Jeronimo, A. (2018). *Strategi komunikasi politik Partai FRETILIN untuk koalisi membentuk pemerintahan Timor Leste periode 2017–2022* [Tesis magister].
- Kemp, S. (2025). *Digital 2025: Indonesia*. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
- Lalu, L. D. A. (2025). Performativity power relations: A discourse analysis of Regent Sudewo's policies via the Instagram account @wargapati_. *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal*, 9(2), 131–153.
- Maryati, O., & Herlambang, Y. T. (2025). Ilmu pengetahuan dalam bingkai konstruksi sosial: Analisis perspektif Berger dan Luckmann. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(3), 2576–2582. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i3.1910>
- Marzuki, I. (2023). *Analisis wacana kritis (Teori dan praktik)*. UNIMUDA Press.
- Nonci, N. (2025). *Public relations dalam pemerintahan daerah: Antara representasi dan akuntabilitas*. CV Eureka Media Aksara.
- Rohmah, S. (2025). *Komunikasi politik 5.0: Strategi, media, dan pengaruh publik*. CV Eureka Media Aksara.
- Rumaf, N., Anshori, D. S., Damaianti, V. S., Sastromiharjo, A., & Al Jumroh, S. F. (2025). Representasi kekuasaan dalam teks pidato Presiden Prabowo Subianto: Tinjauan AWK Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 11(2), 2111–2124. <https://doi.org/10.30605/onoma.v11i2.5790>
- Susanto, D., Jailani, M. S., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Yonatan, A. Z. (2025). Indonesia masuk jajaran pengguna YouTube terbanyak di dunia 2025. *GoodStats*. <https://goodstats.id/article/indonesia-masuk-jajaran-pengguna-youtube-terbanyak-di-dunia-2025-7Cvdz>
- Yunus, S. (2025). Wawancara Prabowo dengan 7 jurnalis, begini respons TII dan PSI. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/wawancara-prabowo-dengan-7-jurnalis-begini-respons-tii-dan-psi-1229529>
- Zahroh, N. I., Nasution, L. A., Tazqia, A. D., Faiha, H. A. I., & Nurhayati, D. (2025). Strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Teknik, tantangan, dan solusinya. *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan*, 3(6), 107–118.